

**PERJANJIAN JUAL BELI ANGSURAN KENDARAAN
BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN HUKUM KAITANNYA
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Djuria Simbuang

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak lemah dalam perjanjian jual beli dan pengaturan klausul tentang jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang posisi hukumnya lemah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori terjadinya kontrak, meliputi teori kehendak dan teori pernyataaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang disebut juga penelitian yuridis normative, dimana yang dijadikan obyek penelitian dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa praktek perjanjian baku jual beli angsuran kendaraan bermotor di masyarakat memang ada, namun demikian klausulanya menunjukkan bahwa hak dan kewajibannya antara kreditor dengan debitor ada yang berimbang dan ada yang kurang berimbang. Apabila dibandingkan antara yang berimbang dengan yang kurang berimbang, maka kenyataannya lebih banyak hak dan kewajiban yang kurang berimbang, karena perjanjian jual beli angsuran kendaraan bermotor ini merupakan perjanjian baku, maka yang membuat adalah pihak yang kuat posisinya, yaitu pihak kreditor, sehingga terjadi *bargaining position* yang tidak sama antara kreditor dengan debitor, karena *bargaining position* pihak kreditor berada diatas, maka kreditor dengan leluasa membuat perjanjian jual beli angsuran ini sesuai dengan kehendaknya, dengan memperbanyak hak dan mengurangi kewajibannya, akibatnya pihak debitor banyak menerima kewajiban daripada haknya. Berlakunya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka kedudukan “obyek perjanjian” berupa kendaraan bermotor, selama masa angsuran berlangsung, menjadi semakin kuat. Hal ini disebabkan karena klausula yang sudah ada dalam setiap perjanjian jual beli angsuran yang mengatakan bahwa “debitor dengan ini menyerahkan kepada kreditor hak miliknyaseacar fidusia”, maka penyerahan hak milik tadi kepada kreditor dilanjutkan dengan tindakan kreditor melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga terpenuhilah paying hukum bagi kreditor untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran bagi debitornya

Kata Kunci : jual beli angsuran

INSTALLMENT SALE AGREEMENT AND MOTOR VEHICLE WITH RESPECT TO LEGAL PROTECTION LAW OF 1999 ON NUMBER 42 FIDUCIARY INSURANCE

Djuria Simbuang

Abstract

This study was conducted to determine the legal protection for weaker parties in the purchase agreement and the clause on collateral arrangements pursuant to Act No. 42 of 1999 on Fiduciary can provide legal protection to parties that its legal position is weak. The theory used in this research is the theory of the contract, covers the theory and the theory of the will of the statement. The method used is the library research (library research), which is also called normative juridical research, which is made the object of research in the study of normative law is a secondary data consists of primary legal materials, secondary, and tertiary. Results of this study was formulated that the practice of buying and selling raw agreement motor vehicle installment in society do exist, however klausulanya show that the rights and obligations between creditor to the debtor no impartial and there is less balanced. When compared between impartial with the less balanced, then the fact that more rights and obligations are less balanced, because the purchase agreement installment of a motor vehicle is an agreement to default, which makes the stronger side position, ie the creditor, resulting in bargaining position which is not the same between the creditor with the debtor, since the bargaining position of the creditors is above, then the creditors can freely make installment purchase agreement is in accordance with his will, with emphasis on the rights and reduce its obligations, consequently debtors received a lot of obligations rather than rights. Applicability of the law number 42 tahun 1999 on Fiduciary, then the position of "object of agreement" in the form of a motor vehicle, for the duration of the installment takes place, becomes stronger. This is because a clause which already exists in each purchase agreement installments which says that "the debtor hereby assigns to creditors rights miliknyaseacar fiduciary", then submission of property rights had to creditors continued with the actions of creditors to register at the Registration Office Fiduciary, so fulfilled paying law for creditors to ensure smooth payment of installments for debtors

Keywords: purchase installments